

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari beberapa kasus yang dipaparkan dalam skripsi ini maka secara umum dapat difahami sebab istri mengajukan nafkah istri ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah dikarenakan suami tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah secara baik dan benar. Istri merasa haknya terabaikan oleh suami.
2. Terdapat beberapa keputusan dari hakim tentang 4 kasus yang diajukan ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan. Kasus pertama antara Nik Azizah binti Che Seman dengan Md Iskandar bin Musa diputuskan bahwa suami diperintah membayar nafkah istri sejumlah RM 500.00 atau RP 1.500.000 sebagaimana yang dituntut oleh istri. Kemudian untuk kasus kedua antara Marjan binti Mokhtar dengan Baharuddin bin Hassan, hakim memerintahkan suami membayar sejumlah RM350.00 atau RP 1.050.000 yaitu separuh dari tuntutan istri. Seterusnya kasus ketiga antara Wan Roshaza binti Wan Ibrahim dengan Hamizi bin Shafie, hakim memutuskan tuntutan istri ditolak karena nusyuz dan suami tidak diperintahkan untuk membayar nafkah istri. Untuk kasus keempat antara Nor Izzati binti Abd Manaf dengan Mohammad Irman bin Che Hashim , diperintahkan untuk berdamai karena adanya permintaan dari pihak yang berperkara. Kasus ini ditarik kembali dan tidak dilanjutkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam pandangan Islam, adanya suatu lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus ini cukup baik. Mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim yang ada dilembaga tersebut sudah benar karena sudah melalui proses hukum acara yang berlaku dilembaga tersebut. Keputusan yang diambil masing-masing kasus berbeda sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Kemudian mengenai sanksi yang ditetapkan kepada suami apabila tidak membayar sesuai yang diputuskan hakim, merupakan suatu ketentuan yang dibenarkan dalam pandangan Islam, karena ini termasuk salah satu bentuk sanksi takzir yaitu sanksi yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk-bentuk sanksinya. Sedangkan dalam nash sendiri tidak disebutkan bentuk-bentuk sanksinya oleh Allah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dari terjadinya pengabaian nafkah suami terhadap istri. Suami istri haruslah mendalami ilmu rumah tangga. Setersunya, Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah perlu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang konsep dan bagaimana pentingnya tanggungjawab suami terhadap nafkah istri agar tidak terjadi kesimpangansuran tentang agama Islam itu sendiri dan untuk menimbulkan rasa keadilan terhadap istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketentuan sanksi denda yang diperuntukkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 seharusnya direvisi semula dengan dinaikkan pemberian sanksi denda yang lebih tinggi dan relevan dengan kondisi masyarakat Islam Kelantan pada masa kini karena denda yang dikenakan yaitu RM 1000 (RP 3.000.000) dilihat kurang efektif lagi.
3. Hukum Islam yang sedia ada haruslah diimplimentasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan sanksi terhadap perilaku bagi seseorang yang mengabaikan nafkah ini. Aplikasi Mahkamah Syariah haruslah dipadukan dengan Hukum Islam agar peranan institusi Mahkamah Syariah sejalan menurut ketentuan Al-Quran dan Hadis.